



Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis

M. Nur Rofiq Addiansyah S.IP., M.A.

Institut Agama Islam Negeri Kudus

rofiqaddians@gmail.com , politicholic@yahoo.co.id

Abstract

This paper will discuss about how coalition forms are carried out by political parties, especially islamic political parties. What is the coalition process, what are the motives of the coalition, and how the formation of the coalition formed will be discussed in this paper. During the Presidential and Vice President Elections in 2019, there were two candidate pairs competing, namely the Ir.Joko Widodo-KH.Maruf Amin and the couple Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

This paper uses a qualitative method with the type of case study. The electoral realm of the 2019 Presidential Elections became the empirical space discussed. The 2019 presidential election was supported by a large coalition of Jokowi-Maruf supporters and Prabowo-Sandi supporters. These two pairs of candidates are supported by political parties based on the Islamic and nationally voters. From this 2019 Presidential Election, we can see the ideological movements of political parties in Indonesia. *First*, political parties are still oriented towards victory rather than ideology and policy. *Second*, the ideology of political parties is increasingly blurred. *Third*, the influence of the electoral system which led to the escape of the ideology of political parties.

Keywords: Coalition, Islamic Political Parties, Ideology, Election of President and Vice President 2019

Pendahuluan

Tulisan ini ingin mengungkapkan proses terbentuknya koalisi-koalisi yang terjadi dalam ranah elektoral. Sebagai ruang empiris tulisan ini ingin mengeksplorasi bagaimana proses koalisi yang terjadi diantara partai politik islam pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Proses pelaksanaan Pilpres 2019 akan menunjukkan bangunan koalisi yang dilakukan partai politik apakah pragmatis atau ideologis.

Proses koalisi, khususnya koalisi yang terjadi pada Pilpres 2019 ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diperbincangkan karena menyangkut beberapa hal. *Pertama*, dalam sistem multipartai seperti yang terjadi di Indonesia, kekuatan politik pada umumnya terdistribusi dalam beberapa partai, sehingga kebutuhan untuk membangun koalisi menjadi suatu hal yang tak terhindarkan. Keberadaan sistem multipartai ini mengharuskan dukungan yang cukup bagi presiden di legislatif serta memperkuat dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan (Hanan, 2015). *Kedua*, kajian mengenai koalisi yang terjadi dibalik pelaksanaan Pilpres menarik untuk didiskusikan karena akan menunjukkan posisi ideologi

partai politik. Koalisi yang dibentuk oleh partai politik ini bisa terjadi di level local maupun nasional. Di level nasional, partai politik tetap tidak tergantikan posisinya sebagai lembaga demokrasi yang melakukan rekrutmen calon (Makhsin, 2016).

Kajian mengenai koalisi sendiri sebenarnya terinspirasi dari “*game theory*”, “*spatial theory*” dan kompetisi elektoral, yakni bagaimana partai politik dan para elitnya sebagai aktor yang rasional berkompetisi dan berusaha memaksimalkan posisinya dengan meraih kekuasaan dipemerintahan (Winter & Dumont, 2006). Lebih jauh koalisi dapat kita maknai sebagai penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit (Pamungkas, 2011). Unit-unit partai politik dengan aneka sumberdaya inilah yang pada akhirnya membentuk formasi tertentu untuk meningkatkan kapasitas demi meraih kekuasaan.

Lebih jauh tulisan ini ingin mendiskusikan dan melacak tentang Bagaimana partai-partai politik yang ada di DPR RI, khususnya partai politik islam dalam membangun ikatan koalisi pada Pemilihan Presiden Tahun 2019?. Lebih jauh tulisan ini ingin melihat bagaimana motivasi dan bentuk formasi koalisi yang terbentuk?. Besar harapan tulisan ini mampu mewarnai kajian-kajian politik yang membahas mengenai koalisi, khususnya koalisi yang dilakukan Partai Politik Islam dalam ranah elektoral.

Fokus waktu dan kasus dalam tulisan ini terbatas hanya pada proses koalisi partai politik menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Metode dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Tujuan mendiskusikan tulisan ini secara praktis ingin melihat bagaimana bekerjanya ideologi pada partai-partai politik islam di Indonesia adapun tujuan teoritis ingin memperkaya kajian-kajian keilmuan politik khususnya tentang partai politik dan pemilu.

Pembahasan

Partai Islam dan Peta Kekuatan Partai Politik Pasca Pemilu 2014

Sebelum kita melihat lebih jauh tentang kekuatan masing-masing partai politik di DPR RI hasil dari Pileg 2014, maka terlebih dahulu kita akan mendiskusikan tentang partai politik Islam. Partai politik secara umum dapat kita maknai sebagai organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur dan kekuasaan yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam kontestasi pemilu (Pamungkas, 2011, pp. 5–6).

Tentang apa itu ‘partai politik islam’, dalam kajian ilmu politik, penggunaan istilah ‘partai islam’ setidaknya memiliki dua konotasi. *Pertama*, ideologi organisasi, yaitu merujuk kepada partai politik yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya. *Kedua*, partai dilihat dari basis kulturalnya, dimana partai politik bukan hanya dilihat sebagai organisasi, tetapi juga sebagai sarana atau media bagi masyarakat, atau kelompok-kelompok di masyarakat untuk mengartikulasikan, mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya (Al-Hamdi, 2013, p. 9). Berdasarkan perjalanan fakta historis, partai islam atau partai yang berasaskan Islam terbagi dalam tiga bagian, yakni: 1. Partai Islam yang berasas Islam, 2. Partai Islam yang berasas Islam dan Pancasila, serta 3. Partai Islam yang berasaskan Pancasila tetapi berbasis massa mayoritas dari kalangan Muslim (Rido dalam Romli, 2013: 9). Partai Islam dan partai yang lain juga memiliki perbedaan, pertama terkait dengan asas. Dalam segi asas, partai Islam berbeda dengan partai lainnya. Partai Islam berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada kitab suci, Al Qur’an dan Hadist, baik mereka yang mencantumkan Islam sebagai asasnya atau menjadikan Islam sebagai spirit perjuangannya. Dari segi pendukung, partai-partai Islam juga memiliki konstituen yang beragam.

Dari hasil Pemilu Legislatif 2014, diantara partai-partai yang lolos ambang batas, memiliki kursi di DPR RI dan dapat kita masukkan sebagai partai-partai Islam adalah PPP, PKB, PKS dan PAN. PPP merupakan partai Islam tertua yang masih bertahan sampai sekarang. Partai berlambang ka’bah ini berasaskan Islam dan Pancasila serta memiliki konstituen utama umat Islam khususnya warga Nahdliyin. Hanya saja dibeberapa tempat ada

juga warga Muhammadiyah dan golongan ormas Islam lain yang juga tergabung dalam PPP. Selain PPP, PKB juga memiliki basis massa warga NU. Partai yang dipelopori oleh Gus Dur ini menjadi salah satu parpol Islam besar di Indonesia. Partai Islam lain yang memiliki basis massa konstituen yang cukup besar adalah PAN. Partai berlambang matahari yang dipelopori oleh Amien Rais ini memiliki basis massa warga Muhammadiyah. Ada juga PKS, Partai Keadilan Sejahtera, partai politik yang memiliki basis kelompok gerakan pendidikan tarbiyah di kawasan perkotaan.

Membaca pemetaan partai politik di DPR RI hasil Pemilu 2014, kita akan melihat bagaimana posisi dan kekuatan partai politik Islam. Pada pemetaan hasil pemilu 2014 ini, *pertama* kita akan melihat pemetaan pada partai politik yang berbasis nasionalis. PDI Perjuangan meraih 23.861.471 suara (18,95 %), jika dikonversikan PDI Perjuangan mendapatkan 109 kursi. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 %) dengan 91 kursi, Partai Gerindra 14.760.371 (11,81%) dikonversi menjadi 73 kursi, Partai Demokrat 12.728.913 suara (10,19%) dengan 61 kursi, Partai Nasdem 8.402.812 suara (6,72 %) dengan 35 kursi, dan Partai Hanura 6.579.498 suara (5,26 %).

Tabel I
Perolehan Suara Partai Nasional Hasil Pemilu Tahun 2014

Partai	Jumlah Suara	Prosentase	Jumlah Kursi
PDI P	23.861.471	18, 95	109
P. Golkar	18.432.312	14, 75	91
P. Gerindra	14.760.371	11, 81	73
P. Demokrat	12.728.913	10,19	61
P. Nasdem	8.402.812	6,72	35
P. Hanura	6.579.498	5,26	16

sumber : diolah dari data KPU RI

Selanjutnya kita akan melihat perolehan suara partai-partai Islam atau partai yang memiliki ideologi Islam. Adapun partai-partai yang berbasis masa Islam atau memiliki ideologi Islam meraih kursi seperti berikut: Partai Amanat Nasional 9.481.621 suara (7,59 persen) dengan 49 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa dengan 11.298.957 suara (9,04 persen) dengan 47 kursi, Partai Keadilan Sejahtera meraih 8.480.204 suara (6,79 %) 40 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 %) dengan 39 kursi.

Tabel 2
Perolehan Suara Partai Berbasis Islam

Partai	Jumlah Suara	Prosentase	Jumlah Kursi
PAN	9.481.621	7, 59 %	49
PKB	11.298.957	9,04 %	47
PKS	8.480.204	6,79 %	40
PPP	8.157.488	6,53 %	39

sumber: diolah dari data KPU RI

Membaca pemetaan politik di DPR RI dari hasil pemilu Legislatif tahun 2014, PDI Perjuangan masih menempatkan diri sebagai pemenang dengan suara 23.861.471. Hal ini

memang tidak mengejutkan karena PDI P memiliki calon presiden yang sangat populer yakni Ir.Joko Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Setelah puasa kekuasaan di Istana selama 10 tahun, PDI Perjuangan kembali menorehkan kemenangan. Partai Demokrat yang pemilu sebelumnya juara, kini harus puas di posisi ke empat.

Adapun partai-partai Islam dengan suara tertinggi adalah PKB, akan tetapi untuk jumlah kursi terbanyak diduduki PAN. Hal ini terjadi karena PAN memiliki persebaran suara yang lebih merata, daripada PKB yang banyak terpusat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rata-rata Partai Islam ini meraih 40 kursi, dengan total keseluruhan 175 kursi. Prosentase kekuatan kursi di parlemen yang diraih partai islam ini berkisar 31,25 %.

Pemilihan Presiden: Arena, Sumber Daya dan Estimasi Koalisi

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari proses rekrutmen kepemimpinan di tingkat nasional. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ini akan menentukan nasib Indonesia selama lima tahun kedepan. Bukan hanya warga Indonesia saja yang tertarik mengikuti, masyarakat dunia pun turut mengikuti. Perdebatan, diskusi dan beragam kampanye di dunia nyata dan didunia maya marak terjadi. Proses koalisi yang dilakukan oleh Partai Politik menjadi salah satu isu yang didiskusikan. Koalisi yang ada di negara berkembang dan demokrasinya belum kuat sering menunjukkan tidak konsistennya partai politik (Altman, 2000, p. 263).

Peraturan pemilihan umum dalam konstitusi negara Indonesia diatur Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang pengaturan lanjutannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu ini mengatur ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang mensyaratkan perolehan kursi minimal 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau minimal 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya. Bila kita melihat hasil Pemilu 2014 yang menjadi acuan dalam mengusung calon Presiden, maka tidak ada satupun partai yang bisa mengusung calon sendiri. Syarat pencalonan yakni minimal 112 kursi atau 25 % suara. PDI Perjuangan sebagai Partai pemenang juga hanya memiliki 109 kursi dan 18,95 % suara.

Proses koalispun menjadi suatu yang tak bisa dihindari bagi partai politik. Koalisi yang terjadi antar partai politik yang memiliki kursi di DPR RI merupakan contoh praktik koalisi yang terjadi pada arena elektoral. Koalisi elektoral ini mengasumsikan adanya aliansi dimana partai politik setuju untuk tidak berkompetisi melawan satu dengan yang lainnya dengan pandangan untuk maksimalisasi representasi mereka bersama (Heywood, 2000, p. 195). Koalisi dalam Pilpres Tahun 2019 terjadi ketika tahapan proses pencalonan dimulai, dimana partai politik minimal harus memenuhi syarat 25 % suara atau 20 % kursi, sehingga partai-partai yang tidak memenuhi syarat ini harus menjalin kekuatan sebanyak mungkin untuk representasi kekuatan.

Dari uraian sebelumnya mengenai pemetaan politik di DPR RI, dari Partai berbasis nasional, PDI Perjuangan memiliki sumber daya yang paling kuat untuk berkoalisi. Sumberdaya ini merupakan besaran kekuatan partai (*size of party power*) yang menjadi penentu dalam terbentuknya koalisi partai (Pamungkas dalam Caplow, 2013). Dengan 109 kursi yang ada di parlemen PDI Perjuangan hampir memenuhi persyaratan ambang batas. Golkar dengan 91 dan 14, 75 % sebagai pemenang kedua juga memiliki kursi yang signifikan. Total suara partai berbasis nasionalis yakni PDI P, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem dan Hanura bila dijumlahkan mencapai lebih dari 50 %, yakni 67,68 % suara dengan 385 kursi. Adapun partai-partai politik Islam, seperti PKB, PAN, PKS dan PPP bila dijumlahkan memiliki 32,32 %.

Sebelum melihat mengenai realitas politik yang terjadi dalam proses koalisi ketika masa kandidasi Pilpres 2019, akan coba kami paparkan mengenai kemungkinan-kemungkinan

koalisi yang akan terjadi berdasarkan kekuatan masing-masing partai tersebut. Theodore Caplow dalam *“A Theory of Coalition in The Triad”* membuat simulasi mengenai kemungkinan-kemungkinan koalisi dari 3 partai yang berbeda. Akan tetapi realitas yang terjadi di DPRD RI terdapat 10 partai politik dengan ragam kekuatan yang berbeda-beda. Sehingga tipologi koalisi ini cukup sulit jika kita gunakan untuk melihat konteks koalisi yang terjadi. Selain itu terbentuknya koalisi sejatinya tidak berdasarkan atas kalkulasi sumberdaya saja, tetapi juga ada dimensi-dimensi lain yang dapat menunjang terbentuknya koalisi.

Hal lain yang dapat kita lihat terkait kekuatan sumber daya dan formasi koalisi yang mungkin untuk terbentuk antara lain diuraikan oleh Hinckley yang dikutip oleh Pamungkas berikut ini. *Pertama*, pendekatan sumberdaya minimum (*minimum resource theory*), teori ini mengasumsikan bahwa pemain akan memaksimalkan pembagian keuntungan berdasarkan norma persamaan, yaitu pembagian keuntungan sama dengan besaran sumberdaya yang dibawa pemain. Pemain dengan sumberdaya terbesar kemungkinan akan menjadi pemain terlemah, sebaliknya pemain dengan sumberdaya terkecil dapat menjadi pemain yang paling penting. Melihat realitas pada peta politik DPR RI, maka PDI Perjuangan dengan 109 kursi belum tentu akan menjadi pemain utama dalam koalisi. PDI P akan kalah jika Golkar dengan 91 kursi akan berkoalisi dengan Gerindra, dan semua partai yang lain akan membentuk koalisi tanpa PDI P.

Kedua, adalah teori kekuatan minimum (*minimum-power theory*), pendekatan ini menekankan pada perbandingan kekuatan relatif pemain daripada distribusi sumberdaya yang dimiliki. Daripada harus berbagi keuntungan dengan pemain yang memiliki sumberdaya yang relatif sama, pemain lebih berharap berbagi keuntungan secara proporsional dengan pemain poros. Koalisi akan ditentukan oleh pemain yang berada pada posisi kunci, poros atau paling penting. Kekuatan pemain “paling penting” adalah kuantitas sumberdaya pemain tertentu yang dapat mengubah koalisi yang kalah menjadi koalisi yang menang. Koalisi ini akan terjadi misalnya saja Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, PKS sebagai partai tengah akan berkoalisi sehingga kekuatan poros tengah ini akan semakin diperhitungkan.

Berikutnya adalah koalisi anti kompetisi (*anticompetition theory*), teori ini menyatakan bahwa sikap tentang kompetisi dan tawar menawar, perbedaan personalitas, dan faktor-faktor lainnya akan memimpin pemain pemain untuk membentuk koalisi yang lebih besar daripada koalisi ukuran minimum. Koalisi akan terbentuk diantara pemain yang memiliki sumber daya relatif sama. Misalnya saja Nasdem, PAN, PKB, PKS berkoalisi dalam satu kubu, koalisi dalam kubu Partai poros tengah ini tentu saja akan memenangkan koalisi dibanding koalisi partai-partai besar. Koalisi juga dimungkinkan dengan terjadinya pilihan acak atau koalisi yang membingungkan, asumsi yang dibangun adalah koalisi yang tidak memungkinkan untuk dihitung secara rasional.

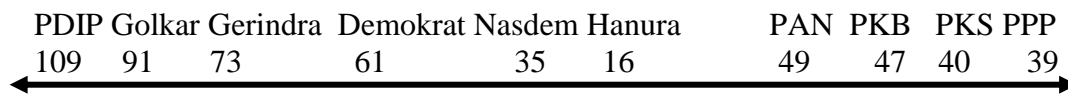
Kecenderungan Ideologi Partai Politik di DPR RI

Menjelang pelaksanaan Pilpres yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, partai politik baik yang berada di ranah pemerintahan (parlemen) maupun diluar parlemen mulai ancap-ancap untuk mempersiapkan diri. Pilpres kali ini bukan saja ajang demokrasi electoral yang mengagendakan suksesi kepemimpinan ditingkat nasional, tapi lebih dari itu Pilpres kalini ini juga akan menentukan wajah dan gerak langkah Indonesia selama lima tahun kedepan.

Setelah kita mengetahui bagaimana kekuatan masing-masing partai yang ada di DPR RI, maka akan kami coba kombinasikan antara kekuatan partai yang berupa jumlah kursi yang dimiliki di parlemen dengan ideologi yang menjadi platform partai tersebut. Dalam hal ini kami akan mencoba menggambarkan model tersebut dengan bagan yang di cetuskan oleh Lijphart. Lijphart menggambarkan partai-partai politik berdasarkan spektrum ideologi dan perolehan suara, dimana partai dibedakan dari yang paling kiri hingga paling kanan. Adapun diposisi tengahnya merupakan partai yang memiliki kedekatan terhadap dua kutub ideologi.

Merujuk dari Asumsi Lijphart ini, maka gambar yang terbentuk atas komposisi partai yang ada di DPR RI adalah sebagai berikut.

Gambar 1
Kecenderungan Ideologi dan Kekuatan Partai Politik DPR RI



Sumber: Diadopsi dari Model Lijphart (1999: 93)

Jika kita lihat gambar diatas, anak panah yang berada ke posisi kanan menunjukkan posisi ideologi Partai Politik Islam sedangkan anak panah ke kiri menunjukkan partai politik yang berhaluan nasional. Adapun posisi paling kanan ke kiri ditempati oleh partai politik yang memiliki jumlah kursi paling besar ke arah kiri dengan kursi yang lebih kecil. PDIP dengan kursi paling besar berada diujung kiri dan PPP dengan kursi yang paling kecil berada dipaling kanan.

Motif Koalisi : Arena Pertarungan Kepentingan

Untuk mengetahui suatu hal yang mendorong bagi partai politik untuk membentuk koalisi, para pakar telah mengidentifikasi beberapa hal. Ada yang mengemukakan asumsi bahwa motif partai politik untuk membentuk koalisi pada dasarnya karena adanya dua dorongan, yakni orientasi kekuasaan (*office-oriented approaches*) yang mengasumsikan bahwa partai semata-mata menaruh perhatian terhadap kekuasaan sehingga kekuatan kursi menjadi hal yang penting dan orientasi kebijakan (*policy oriented approaches*) yang menekankan pada pentingnya platform partai yang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan (Pamungkas, 2011). Selain itu motivasi koalisi dapat juga terdorong oleh keinginan untuk meraih suara kemenangan (*voted-oriented approaches*).

Motivasi pembentukan koalisi yang berbeda-beda ini juga menentukan formulasi pembentukan koalisi yang berbeda. Seperti pada bagan yang telah kami paparkan mengenai spektrum ideologi dan sumber daya yang dimiliki partai politik, Lijphart (1999) mengemukakan adanya 6 model yang memungkinkan terbentuknya formulasi koalisi. Pertama, *minimal winning coalition* merupakan koalisi yang didasarkan pada maksimalisasi kekuasaan dengan pengabaian partai yang tidak perlu. Spektrum ideologi partai juga bukanlah hal yang penting bagi koalisi ini. Kedua, *minimum size coalition* yakni koalisi yang dibangun oleh partai besar dengan partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas. Ketiga, *bargaining proposition coalition* yakni koalisi dengan jumlah partai paling sedikit. Keempat, *minimal range coalition* yakni koalisi berdasarkan kedekatan pada kecenderungan ideologis. Kelima, *minimal connected winning coalition* yakni koalisi yang terjadi antara partai-partai yang memiliki persambungan orientasi kebijakan. Keenam, *Policy viable coalition*, yaitu koalisi yang terjadi diantara partai-partai yang secara spesifik memang memiliki kepedulian yang sama yang berkaitan dengan kebijakan.

Proses koalisi ini menjadi suatu arena yang sangat penting terkait dengan ragam tujuannya. Secara lebih sederhana kita dapat melihatnya dari dua pendekatan, teori koalisi yang berfokus pada ideologi dan teori koalisi atas dasar kemenangan minimal (Ambardi, 2009). Pendekatan ideologis ini mengasumsikan bahwa pentingnya kesamaan ideologi dan kebijakan partai sebagai pertimbangan dalam membentuk koalisi, para politikus tidak menjadikan jabatan kekuasaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk menerapkan kebijakan tertentu. Besar kecilnya koalisi tidak menjadi kriteria utama dalam merangkul atau mengesampingkan satu partai. Tautan elektoral akan terwujud ketika komitmen ideologis partai yang dikampanyekan sebelum dan selama pemilu tetap mewarnai

keputusan partai dalam memilih mitra koalisi (Swaan: 1973 dalam Ambardi: 2009). Berikutnya pendekatan yang kedua adalah teori koalisi kemenangan-minimal atau koalisi berbasis suara minimal. Logika utama dari pendekatan ini adalah pembentukan koalisi pada dasarnya merupakan upaya memenangi persaingan berdasar pada kuantitas, Kemenangan diparlemen akan ditentukan oleh suara terbanyak. Singkatnya peserta koalisi akan berfokus pada suara yang diperlukan guna memenangi pertarungan diarena legislatif (Riker :1962 dalam Ambardi: 2009).

Setelah mengurai pendekatan-pendekatan koalisi secara teoritis, kini akan kita lihat bagaimana proses pembentukan koalisi yang terjadi di DPR RI. Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang lalu pada akhirnya diikuti oleh dua pasang calon kandidat dan di usung dua kubu yang berbeda. Pasangan pertama adalah Ir. Joko Widodo- KH. Maruf Amien yang diusung oleh PDI P, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, dan PPP. Selain itu pasangan ini juga mendapat dukungan dari partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen yakni PSI, PBB, Perindo dan PKPI. Koalisi yang kedua adalah koalisi Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Koalisi ini didukung oleh Partai Gerindra, PAN,PKS dan Demokrat.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini merupakan kompetisi politik yang luar biasa. Bukan saja elit-elit politik yang terbelah, masa dibawah juga ikut terbelah. Pengusaha-pengusaha, maupun media-media massa juga turut berpartisipasi. Perdebatan di ruang media sosial maupun ruang-ruang publik di dunia nyata juga semakin hangat. Masing-masing pendukung mengklaim sebagai pemilik calon terkuat. Pembilahan masyarakat saat Pilpres ini terjadi dilevel aras local maupun di media massa. Prabowo mendapat dukungan kuat dari gerakan muslim modern seperti alumni 212, sedangkan Jokowi mendapat dukungan dari organisasi masa Islam besar Nahdlatul Ulama (Maklane, 2019, p. 3).

Ditingkat elit, Partai-Partai Politik yang berkoalisi rata-rata berorientasi pada kekuasaan (*office-oriented approaches*) dan orientasi kemenangan (*voted-oriented approaches*) daripada orientasi kebijakan (*policy-oriented approaches*), Hal ini terlihat dari proses kolisi yang dibentuk partai-partai yang lebih banyak melihat kekukatan dan orientasi kemenangan daripada ideologi. Partai-Partai Islam seperti PKB dan PPP sudah sejak jauh-jauh hari mengklaim untuk mendukung Jokowi, sedangkan PKS akan mendukung Prabowo. Belakangan muncul PAN yang juga ikut mendukung Prabowo.

Bagi PDI Perjuangan, pemilu kali ini merupakan momen yang sangat penting untuk mempertahankan kan kemenangan. Setelah menang pada Pemilu 1999, pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, PDI P harus menerima kekalahan. Pada Pemilu 2014 PDI P kembali meraih kemenangan baik di legislatif maupun di eksekutif dengan sukses meraih posisi presiden. PDI P memiliki calon terbaik yakni Joko Widodo yang sukses ia dukung sejak menjadi Walikota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden pada Tahun 2014.

Bagi partai-partai nasionalis lain seperti Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, Jokowi sebagai calon incumbent dianggap memiliki banyak kemudahan untuk menggapai kemenangan. Dengan tetap mendukung Jokowi maka sederet kepentingan-kepentingan lebih mudah terealisasi. Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura juga memiliki kader-kader yang duduk sebagai menteri. Sebagai partai politik yang cukup besar, dengan kekuatan kursi dan suara pada pemilu sebelumnya yang cukup besar, seharusnya Partai Golkar mampu mengusung calon sendiri atau menjadi pemimpin koalisi, akan tetapi karena tidak adanya calon-calon yang cukup kuat, Partai beringin ini lebih memilih bersama barisan koalisi yang di pimpin PDI Perjuangan.

Apa yang dilakukan Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura untuk berkoalisi dengan PDI P, bias saja kita tangkap sebagai partai-partai yang merasa dirinya sebagai partai nasionalis, sehingga memiliki kedekatan orientasi ideologi yang sama. Akan tetapi dalam koalisi ini kemudian memunculkan mitra koalisi yang baru dari Partai Islam.

Partai Islam yang ikut mendukung Jokowi adalah Partai Kebangkitan Bangsa. PKB menganggap Islam sebagai ideologi dan terbuka terhadap beragam perbedaan. PKB merepresentasikan dirinya sebagai partai golongan Nahdliyin akan tetapi tetap menghargai perbedaan. Pada Pilpres 2019 sudah jauh-jauh hari PKB berancang-ancang untuk menjadi calon wakil presiden. Baliho, gambar-gambar dan alat peraga maupun kampanye-kampanye Cak Imin juga sudah bermunculan dimana-mana. Ambisi PKB untuk benar-benar menjadi calon wakil presiden sangat bulat. Akan tetapi, hingga akhir pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi lebih memilih KH. Maruf Amin. Sama seperti PKB, Partai Islam yang juga ikut mendukung Jokowi adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang ka'bah ini sudah sangat semangat untuk mendukung Jokowi jauh sebelum pencalonan Presiden dimulai. Bahkan partai ini sudah memasang gambar partainya dengan Jokowi diberbagai media. Diberbagai acara PPP, Jokowi juga selalu diundang untuk hadir.

Tanggal 9 Agustus 2019, Koalisi Pendukung Jokowi- KH. Maruf Amin resmi di deklarasikan. Jokowi-Ma'ruf Amin didukung 9 partai politik yang memiliki kursi di parlemen maupun tidak, baik itu partai nasionalis maupun partai yang berbasis masa Islam. Sembilan Partai Politik yakni PDIP, PKB, Golkar, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP. Sembilan partai politik ini kemudian mendeklarasikan Koalisi Indonesia Kerja. Belakangan muncul juga Partai Islam, Partai Bulan Bintang turut pula bergabung dalam koalisi ini.

Koalisi Adil Makmur menjadi kompetitor Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung kembali Jokowi. Koalisi ini dideklarasikan di Rumah Kertanegara, 7 September 2019. Koalisi ini dipimpin oleh Partai Gerindra yang mengusung langsung Ketua Umumnya Prabowo Subianto untuk menjadi calon Presiden, bersama Sandiaga Uno sebagai Calon Wakil Presiden. Turut mendukung koalisi ini adalah partai politik berbasis Islam yakni Partai Keadilan Sejahtera yang berbasis masa tarbiyah dan Partai Amanat Nasional yang berbasis masa warga Muhammadiyah. Nama koalisi adil makmur, menurut Sekjen Partai Gerindra, sesuai yang dilansir Tempo yakni sesuai cita-cita koalisi ini dimana ingin mewujudkan keadilan ekonomi, keadilan hukum dan kemakmuran.

Partai Gerindra dengan kursi di DPR yang paling besar tentu saja merasa layak untuk mengusung calon sendiri, apalagi elektabilitas dan popularitas Prabowo dianggap mampu untuk menjadi lawan tangguh Jokowi. Bagi PKS, yang selama ini selalu menjadi 'lawan' PDIP, melawan Jokowi dan mendukung Prabowo adalah sebuah kepastian. Apa lagi PKS dan Gerindra memiliki hubungan yang sangat dekat, khususnya saat Pemilu 2014. Selain Gerindra dan PKS, koalisi ini juga mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional yang sejak Pemilu 2014 juga sudah bergabung dengan koalisi ini. Belakangan muncul juga Partai Demokrat dan Partai Berkarya yang juga ingin memperkuat Koalisi Adil Makmur.

Koalisi Partai Politik Pada Pemilu 2019: Pragmatis atau Ideologis

Pemilihan Umum 2019 meninggalkan cerita sejarah politik dalam perjalanan Bangsa Indonesia. Pemilu 2019 juga memberi gambaran bagaimana eksistensi partai politik Islam. Era awal reformasi, Partai Politik Islam baru banyak bermunculan. Hal ini ditengarai karena beberapa sebab, karena faktor teologis yang mengatakan bahwa agama tak bisa dipisahkan dari politik, faktor sosiologis dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, faktor historis dimana sejarah perjuangan bangsa tak bisa lepas dari perjuangan partai politik islam, serta faktor reformasi yang memberikan angin besar bagi tumbuhnya partai-partai politik islam (Romli, 2006, p. 244). Partai-partai politik Islam tumbuh subur dengan beragam wajah, ada yang mencoba mempertahankan politik aliran, ada juga yang ingin membentuk wajah baru (Ufen, 2006, p.16). Akan tetapi selama dua decade perjalanan reformasi ini, apakah partai politik islam ini sudah mempertahankan garis ideologinya secara benar?. Koalisi partai politik pada ranah Pemilu 2019 akan memberi jawaban.

Pertama, berorientasi kemenangan. Motif partai politik pada koalisi Pemilu 2019 lebih bermotif kemenangan daripada orientasi ideologi dan kebijakan. Hal ini terlihat dari proses

koalisi yang dilakukan partai politik menjelang pemilu. Baik partai politik islam maupun partai politik nasionalis semua mengandalkan pada hitung-hitungan kursi. Berapa kursi yang dimiliki, serta kursi apa saja yang nanti didapat seandainya calonnya menang terus mengemuka. Adapun wacana koalisi tanpa syarat, koalisi tanpa bagi-bagi kursi belum terealisasi. Baik partai politik yang bernaung dalam koalisi Indonesia Kerja maupun Indonesia Adil Makmur sama-sama lebih berorientasi pada kemenangan.

Kedua, Ideologi partai politik semakin kabur. Kemewahan ideologi yang disandang partai politik semakin kabur. Partai mana yang memiliki ideologi islam, partai mana yang memiliki ideologi nasionalis semakin tidak jelas. Kaburnya ideologi partai politik islam ini semakin mengubur mimpi -mimpi bersatunya partai politik islam dalam satu koalisi. Masyarakat dan pemilih semakin bingung untuk menyalurkan ideologinya. Untuk membedakan partai politik satu dengan yang lainnya kini lebih kepada siapa pemimpin figur partai tersebut serta siapa saja basis-basis pemilih partai tersebut.

Ketiga, sistem pemilu dan kaburnya ideologi partai politik. Adanya ambang patas pemilu serta semakin tingginya jumlah kursi dan jumlah suara minimal yang diwajibkan bagi partai politik sebagai persyaratan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden ternyata belum efektif untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Adanya persyaratan jumlah minimal suara dan minimal kursi direspon partai-partai politik dengan membangun koalisi tanpa mempertimbangkan ideologi. Asal jumlah minimal suara dan minimal kursi memenuhi, koalisi ini langsung mengusung calon sendiri.

Simpulan

Proses koalisi yang dilakukan semua partai politik, baik partai politik berbasis islam maupun partai politik yang dilakukan partai politik berbasis nasionalis sudah tak ada bedanya. Dalam membentuk koalisi, semua partai politik memiliki orientasi kemenangan yang lebih kuat daripada pada orientasi ideologi dan kebijakan. Hitung-hitungan berapa sumber daya kekuatan yang dimiliki dan besaran kekuasaan yang akan didapatkan lebih dominan daripada ideologi dan kebijakan. Ideologi partai politik Islam juga semakin kabur, masyarakat lebih melihat siapa sosok figur ketua umum atau presiden partai dari pada melihat apa ideologi partai. Masyarakat akan melihat siapa atau golongan apa saja yang menjadi pemilih utama partai daripada melihat kebijakan partai. Sistem pemilu yang bekerja juga berpengaruh terhadap garis ideologi partai.

Rekomendasi secara praktis, penulis berharap partai politik lebih berani menjaga konsistensi ideologi daripada sekedar kepentingan pragmatis kemenangan. Adapun rekomendasi teoritis yakni penelitian-penelitian yang dapat dilakukan kedepan diantaranya: *pertama* adanya relasi tentang sistem pemilu yang berlaku di Indonesia dengan garis ideologi partai politik. *Kedua*, kuat lemahnya struktur koalisi yang terbentuk sebelum maupun setelah pemilu. Dan yang ketiga tentang masa depan ideologi-ideologi partai politik islam pasca Pemilu 2019.

Daftar Pustaka

- Al-Hamdi, R. (2013). *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Altman, D. (2000). *The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies The Case of Uruguay, 1989–1999*. London: Sage Publication.
- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: KPG.
- Hanan, D. (2015). *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia, Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Puskapol UI.
- Heywood, A. (2000). *Key Concept in Politics*. Hampshire: Macmillan and Co.Ltd.
- Makhsin, L. (2016). Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilgub di Jawa Tengah 2015. *Jurnal Sosial FISIPOL UGM*.
- Maklane, L. (2019). *The 2019 Indonesian Elections: An Overview*. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Romli, L. (2006). *Islam Yes, Partai Islam No*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winter, L., & Dumont, P. (2006). *Parties in to Government: Still many Puzzless, dalam Katz, Richard and William Crotty* (Handbook o). London: Sage Publication.